

KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEMFUNGSIKAN PEDESTRIAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Winda Witami

Email: Windawitami@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pedestrian merupakan trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk menikmati nuansa bangunan perkotaan dan taman-taman Kota/ Kabupaten. Dalam konteks perkotaan biasanya dimaksud sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor. Trotoar di Pekanbaru telah berubah fungsi menjadi tempat parkir kendaraan roda dua, tempat pedagang kaki lima, tempat pemasangan papan iklan dan sebagainya. Beberapa dinas terkait bertanggung jawab dengan hal ini seperti Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara instansi terkait dalam memfungsikan pedestrian dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi antara kedua dinas terkait.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru. Menggunakan grand teori Fayol, Koontz dan O'Donnell, dimana didalamnya terdapat 4 indikator yaitu : 1. Kerjasama secara serasi, 2. Mengetahui tugas masing-masing. 3. Hubungan komunikasi yang baik, 4. Adanya pertemuan melalui rapat. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan *key informan* sebagai sumber informasi dan teknik bola salju sebagai sumber keabsahan data.

Hasil penelitian menyatakan bahwa koordinasi yang telah dilakukan Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum optimal dapat dilihat dari 4 indikator yaitu komunikasi, kerjasama, pembagian tugas dan pertemuan rapat yang dilakukan bukan hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran namun harus dilakukan untuk pengawasan penertiban di pedestrian. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung seharusnya lebih memadai agar tercipta kinerja yang optimal antar kedua instansi. Sarana dan prasarana juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi sehingga setiap orang tahu tugas dan fungsi mereka agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Jika semua ini berjalan dengan baik, maka pedestrian akan berfungsi sebagai tempat untuk pejalan kaki.

Kata kunci : Koordinasi, Pedestrian

COORDINATION OF THE OFFICE OF TRANSPORTATION WITH CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN FUNCTIONING PEDESTRIAN IN PEKANBARU CITY

By : Winda Witami

Email : Windawitami@gmail.com

Advvisor : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Department of Public Administration Faculty of Social and political sciences

University of Riau

Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Pedestrian is a sidewalk that is destined for pedestrians to enjoy the feel of urban buildings and gardens City / District. In an urban context it is usually referred to as a special room for pedestrians that serves as a means of attainment which can protect from the danger coming from motor vehicles. The sidewalks in Pekanbaru have been transformed into two-wheeled parking spaces, where street vendors, billboards and so on. Several related agencies are responsible with this matter, such as the Office of Transportation with the Municipal Police Force Unit Pekanbaru. The purpose of this study is to find out how the coordination between relevant agencies in the functioning of pedestrian and to determine what factors affect the coordination between the two related agencies.

This research was conducted to know the coordination between the Department of Transportation with the Civil Service Police Unit in Functioning Pedestrian in Pekanbaru City. Using the grand theory of Fayol, Koontz and O'Donnell, in which there are 4 indicators are: 1. Cooperation in harmony, 2. Knowing each task. 3. Good communication, 4. Meetings through meetings. This research uses qualitative descriptive method. The technique of collecting through observation, interview and documentation with key informant as source of information and technique of snowball as source of data validity.

The result of the research stated that the coordination that has been done by the Transportation Agency with the Pekanbaru City Police Precinct Police Unit has not been optimally can be seen from 4 indicators namely communication, cooperation, division of tasks and meeting meetings conducted not only after the violation but must be done for supervisory control in the pedestrian . In addition, supporting facilities and infrastructure should be sufficient to create optimal performance between the two agencies. Facilities and infrastructure should also be supported by potential human resources (HR) so that everyone knows their duties and functions in order to avoid overlap in the execution of tasks. If all this goes well, then pedestrian will serve as a place for pedestrians.

Keywords: Coordination, Pedestrian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedestrian adalah trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk menikmati nuansa bangunan perkotaan dan taman-taman Kota/ Kabupaten. Pedestrian menjadi indikator pokok bagi kemajuan peradaban dan pembangunan Kota masa depan. pentingnya pedestrian adalah sebagai tempat untuk kenyamanan dan kelancaran bagi pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya. Dengan berjalan kaki sebenarnya aktivitas menuju kawasan tujuan dapat dilakukan dengan lebih bebas dan lebih fleksibel meskipun dengan catatan bahwa hal ini hanya dilakukan dengan jarak dekat.

Di Pekanbaru, pembangunan fasilitas umum khususnya jalan raya dan trotoar terkesan kurang manusiawi. Artinya, prioritas utama pembangunan tidak dibuat untuk kelancaran akses pejalan kaki. Namun sebaliknya, acuan pembangunan melulu memperluas volume jalan kendaraan dan sedikit memperhatikan kenyamanan pejalan kaki. Bahkan yang semestinya menjadi hak pejalan kaki serta merta diserobot oleh pengguna kendaraan demi menghindari kemacetan karena volume jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada.

Di sisi lain kota Pekanbaru tampak gerombol pedagang kaki lima yang mejeng di atas trotoar. Pejalan kaki dari arah yang berlawanan terpaksa harus mengalah dan turun ke jalan aspal karena trotoar sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Mobil yang melintas pun terpaksa harus berjalan merayap untuk menghindari para pejalan, dan akhirnya jalan pun menjadi macet.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi menangani kasus tersebut bukan tidak melakukan upaya untuk

penertiban jalur pedestrian tersebut. Mereka telah melakukan tindakan demi terciptanya pedestrian yang tertib dan nyaman untuk digunakan, seperti sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan pedestrian diluar fungsinya. Satpol PP mempunyai tugas dalam Penegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Maka dari itu, pentingnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satpol PP Kota Pekanbaru yang akan berpengaruh dalam memfungsikan kembali jalur pedestrian sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya

yang ingin meneliti masalah yang sama dengan mengembangkan ilmu Administrasi Publik.

2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang Koordinasi Dinas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru.

KONSEP TEORI

1. Organisasi

Menurut Lubis dan Huseini(2009:5) organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu (orang), yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu, dan juga mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

2. Koordinasi

MenurutDjamin dalam Hasibuan(2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.

Griffin(2012:165) koordinasi adalah proses menghubungkan aktivitas-aktivitas berbagai departemen didalam sebuah organisasi. Koordinasi merupakan salah satu

elemen utama dari fungsi manajemen *organizing*.

Menurut Manullang(2008:12) koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcoan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi intruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat dan mengadakan pelatihan dan bila perlu memberi teguran.

3. Pejalan Kaki

Menurut Fruin dalam Iswanto (2006:4) berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu-satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada di dalam aktivitas komersial dan kulturak di lingkungan kehidupan kota. Berjalan kaki merupakan alat penghubung antara moda-moda angkuta yang lain.

Anggraini (2009:50) memaparkan bahwa pejalan kaki merupakan kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan dan harus mendapatkan tempat yang selayaknya. Pejalan kaki pada dasarnya lemah, mereka terdiri dari anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang berpenghasilan rata-rata kecil.

Menurut Gidenon dalam Iswanto (2006:4) berjalan kaki merupakan sarana transportasi yang menghubungkan antara fungsi kawasan satu dengan kawasan yang lain terutama kawasan perdagangan, kawasan budaya, dan kawasan pemukiman, dengan berjalan kaki menjadikan suatu kota menjadi lebih manusiawi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang berada di JL. Dr. Sutomo, No 88, Sekip, LimaPuluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155 dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di jalan Jendral Sudirman No. 464.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih tentang Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satpol PP dalam Memfungsikan pedestrian di Kota Pekanbaru. Menurut Sugiyono (2013:97), Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*). Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data diperoleh dari sumber individu seperti hasil wawancara atau sumber data yang berkaitan langsung tentang Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satpol PP dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer berupa buku-buku penunjang, dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini dapat digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satpol PP dalam Memfungsikan pedestrian di Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data relevan penelitian (Riduwan 2005:31).

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru

Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat sebuah koordinasi ialah diperlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak, kemudian selalu terjalinnya komunikasi baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas. Tanpa koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan akan tergoda dengan mendahulukan kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan sasaran organisasi.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori gabungan yang dikemukakan oleh Fayol, Koontz dan O'Donnell (Sutarto, 2006:143) yang menjelaskan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikasi

“Kalau untuk informasi yang kami berikan sudah jelas, pihak Dinas Perhubungan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan jarang melakukan komunikasi secara langsung melainkan hanya melakukannya dengan melalui handpone. Karena sebenarnya kami sudah mengetahui tugas kami dalam Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dalam upaya dengan tujuan memfungsikan

kembali kawasan pedestrian di Kota Pekanbaru”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, 26 April 2017)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa kejelasan tujuan yang disampaikan dengan tim yang berkaitan dikatakan sudah berjalan dengan baik. Dimana koordinasi dalam memfungsikan kembali pedestrian sebagaimana mestinya sudah dibicarakan dalam suatu pertemuan. Dikatakan dalam pertemuan tersebut sudah dibuat kesepakatan, setiap anggota dalam tim sudah mengetahui tugas masing-masing. Jika sewaktu-waktu ada masalah dapat dikabari langsung melalui media yaitu handpone. Namun bentuk komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Satpol PP seperti ini tidaklah efektif karena pada hakikatnya untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas perlu dilakukan pertemuan agar kinerja dapat sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

2. Kerjasama

“Kita bekerja dengan berpedoman pada peraturan yang ada, dalam menjalankan kerjasama kita dituntut untuk mengetahui tugas masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya. Kami melakukan kerjasama sesuai dengan tindakan yang sama. Namun tidak seterusnya kami kelapangan untuk membantu Satpol PP dalam menertibkan pedagang dan parkir liar di kawasan pedestrian karena sebenarnya sudah menjadi tugas Satpol PP untuk menertibkannya”. (Wawancara dengan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalin Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 25 April 2017)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa saling pengertian antar tim

penertiban pedagang kaki lima di kawasan pedestrian di Kota Pekanbaru yang sudah dibentuk dan dapat terealisasi sebagaimana mestinya, baik karena dengan adanya melakukan pertemuan dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sikap saling pengertian yang dilakukan misalnya dengan saling menghargai antar sesama dan bertoleransi untuk menutupi kelemahan dari masing-masing anggota tim penertiban pedagang kaki lima yang menyalahi aturan. Sehingga setiap pekerjaan yang kurang mampu dikerjakan oleh rekan kerjanya akan ditutupi dengan rekan kerjanya yang lain. Maka dari itu diperlukan sikap saling pengertian dalam bekerjasama agar dalam melaksanakan suatu pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan harmonis.

3. Pembagian Tugas

“Sudah pasti ada untuk pedoman mengenai rincian dan uraian tugas yang diemban oleh masing-masing dinas, ini sudah kami bahas dalam pertemuan diawal pembentukan tim. Dan kami mempunyai tupoksi dalam pembagian tugas tersebut, disitu dijelaskan apa tugas yang harus dilakukan masing-masing dinas. (Wawancara dengan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalin Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 25 April 2017).

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa masing-masing pihak sudah mengetahui dan menjalankan tugasnya masing-masing. Satpol PP melakukan ketertiban umumnya sesuai dengan perda dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penertiban oleh pejabat daerah serta aturan-aturan teknis dalam penertiban. Uraian tugas sangat penting sebagai alat ukur dalam pencapaian kinerja dan sebagai bahan

analisis untuk mengetahui dengan tepat jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemampuan merincikan tugas juga harus disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja yang tergabung didalam tim penertiban pedagang dan parkir liar yang menyalahi aturan di kawasan pedestrian Kota Pekanbaru. Sehingga dengan spesifikasi tugas yang sesuai dengakeahlian yang dimiliki akan menciptakan pelaksanaan tugas yang baik dapat meminimalisir kesalahan.

4. Pertemuan Rapat

“kalau untuk melakukan rapat hanya untuk membahas penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar kami jarang melakukannya. Kami melakukan pertemuan rapat apabila kondisi di kawasan pedestrian sudah memburuk, itupun tidak hanya membahas masalah penertiban di pedestrian melainkan membahas semua masalah yang terjadi di Kota Pekanbaru, seperti Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dll. Dalam melakukan rapat, unsur terkait yang diharapkan kehadirannya justru tidak hadir dalam rapat. ini sering kali terjadi sehingga pimpinan langsung tidak dapat berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi”. (Wawancara dengan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalin Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 25 April 2017)

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa jarang sekali dilakukan pertemuan rapat yang teratur antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Pertemuan dapat terjadi hanya sesekali saja namun kehadiran yang diharapkan pada saat rapat adalah pimpinan langsung dan yang hadir hanya perwakilan sehingga pimpinan

langsung tidak dapat berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi.

A. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Pada Objek Wisata Danau Raja Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Setelah penulis melakukan serangkaian berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor yang mempengaruhi terjadinya koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Perhubungan sangatlah kurang, kekurangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dalam Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Sarana dalam memfungsikan pedestrian yang menyebabkan tidak terawasi sehingga Dinas Perhubungan tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Dinas perhubungan dengan Satpol PP apakah sudah berjalan atau belum.

“Memang saat ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkendala dengan sumber daya manusia. Luas wilayah kerja dan bertambahnya beban kerja yang kami kelola

membuat kami sedikit keteteran dalam mencapai target yang dibebankan. Pegawai yang bertugas turun kelapangan untuk mengawasi pedagang dan parkir liar di kawasan pedestrian Kota Pekanbaru hanya sekitar 8-9 orang, hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan karena tugas yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah personil yang membuat pelaksanaan dilapangan cukup memakan waktu”.(Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 24 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia atau jumlah petugas dalam melakukan penertiban pedagang dan parkir liar di kawasan pedestrian Kota Pekanbaru mengingat banyaknya pertimbangan dan beban tugas yang di jalani sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru.

“Dalam masalah infrastruktur kami memang kekurangan gedung dan kendaraan operasional yang menghambat pelaksanaan kami dalam melakukan penertiban pedagang dan parkir liar di kawasan pedestrian. Kami mendapat pengurangan jatah kendaraan roda empat sebanyak 2 unit pada 4 tahun lalu yang membuat kinerja kami kurang optimal dan kami hanya memasang plang-plang dilarang parkir saja dan tidak satupun memasang plang tentang perda nomor 2 serta tidak memasang kamera pengawas demi kelancaran pelaksanaan penertiban ini”. (Wawancara dengan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalin Jalan Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru, 25 April 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu permasalahan yang ditemui dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan penertiban. Karena kalau tidak adanya sarana dan prasarana seperti gedung dan kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan penertiban di kawasan pedestrian, untuk itu diperlukan infrastruktur seperti kendaraan operasional untuk proses kelancaran dalam melakukan penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang dan parkir liar yang menyalahi aturan sehingga pedestrian dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru, yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru. Maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru yang dilihat dari empat indikator yaitu dilihat dari indikator

pertama yaitu komunikasi bahwa kejelasan tujuan yang diberikan menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan dengan Satpol PP sudah saling menjalankan tugas masing-masing dalam memfungsikan pedestrian.

2. Dilihat dari indikator kedua yaitu kerjasama, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memfungsikan pedestrian, hanya sebatas tahu tugas masing-masing sehingga masih banyak pedagang kaki lima dan parkir liar yang memenuhi kawasan pedestrian.
3. Dilihat dari indikator ketiga yaitu pembagian tugas, adanya Perincian dan pembagian tugas bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan saling berebut tugas. Adanya pembagian tugas yang terdiri dari adanya penempatan pegawai sesuai bidang-masing-masing bahwa dalam melaksanakan penertiban pedagang dan parkir liar untuk memfungsikan pedestrian di Kota Pekanbaru, setiap pegawai yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing.
4. Dilihat dari indikator keempat yaitu pertemuan rapat, dapat disimpulkan bahwa pertemuan rapat yang teratur dan melibatkan unsur terkait serta pertemuan terjadwal dan terencana kurang terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan jarang dilakukan pertemuan rapat yang dilakukan keduanya serta ketidak hadirannya unsur terkait dalam pertemuan rapat yang mengakibatkan pimpinan tidak dapat berpartisipasi terhadap masalah yang dihadapi dan membuat kerjasama yang belum efektif kurang optimal.

5. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak tidak sebanding dengan pekerjaan yang sangat banyak membuat kinerja kurang optimal. Faktor lainnya dapat disimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana seperti gedung dan transportasi operasional yang digunakan untuk melakukan penertiban yang membuat pelaksanaan penertiban di kawasan pedestrian tidak berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang kurang optimal

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan untuk kedua instansi terkait yaitu :

1. Komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar lebih memaksimalkan dalam memberikan dan menerima informasi dengan jelas agar tujuan dan target kegiatan dapat berjalan dengan baik serta dengan kemajuan teknologi juga sangat menunjang terlaksananya komunikasi yang baik.
2. Kerjasama dengan adanya saling pengertian dan tindakan yang selaras antara Dinas Perhubungan dengan Satpol PP Pekanbaru agar bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan dilakukan sesuai pada pedoman yang ada agar tidak terjadi penyimpangan dan agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik.
3. Pembagian tugas dengan merincikan serta uraian tugas juga harus disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki masing-masing unit kerja agar dapat melaksanakan penertiban dengan optimal sehingga dengan spesifikasi tugas yang sesuai dengan keahlian akan menciptakan pelaksanaan tugas yang baik dapat meminimalisir kesalahan.
4. Pertemuan rapat seharusnya dapat dilakukan dengan rutin untuk dapat membahas lebih dalam mengenai penertiban dalam memfungsikan pedestrian serta para pimpinan langsung diharapkan hadir saat pertemuan rapat agar dapat berpartisipasi terhadap masalah yang dihadapi serta tercapai tujuan yang diharapkan dengan optimal.
5. Selain komunikasi, kerjasama, pembagian tugas dan pertemuan rapat, sarana dan prasarana yang mendukung seharusnya lebih memadai agar tercipta kinerja yang optimal antara Dinas Perhubungan dengan Satpol PP Pekanbaru. Sarana dan prasarana juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berpotensi sehingga setiap anggota tahu tugas dan fungsi mereka sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Jika semua ini berjalan dengan baik maka pedestrian dapat digunakan sebagaimana mestinya digunakan untuk pejalan kaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Niniek. 2009. *Pedestrian Ways dalam Perancangan Kota*. Klaten: Yayasan Humaniora
- Feriyanto, Andri & Endang Shytatriana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1 untuk Mahasiswa dan Umum)*. Yogyakarta: Mediatara.
- Griffin, E. 2012. *In A First Look At Communication Theory (p. Eight edition)*. Amerika: mcGrew Hill.

- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta
- _____. 2012. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisirevisi I cetakankeenam)*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2007. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisirevisi I cetakankeenam)*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi Revisi. Cetakan ketujuh)*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Cetakan kelimabelas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lubis, Hari.S.B dan Huseini, Martani. 2009. *Pengantar Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas FISIPOL UI: Jakarta.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sobirin, Achmad. 2007. *Budaya Organisasi*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 2000. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: gadjah Mada University Press
- Terry, George R. 2006. *Azas-azas Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2009. *Perilaku Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wursanto, Ig. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. ANDI: Yogyakarta.
- _____. 2003. *Manajemen Kepegawaian 2*. Kanisius: Yogyakarta.
- Jurnal
- Iswanto, Danoe. 2006. *Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki – Studi Kasus Penggal Jalan Pandaran dimulai dari Jalan Randusari Hingga Kawasan Tugu Muda*. ENCLOSURE, 5 (1). Pp. 21-29 ISSN 1412-7768
- Referensi Dari Website :
- Wikipedia Ensiklopedia Indonesia